

POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024: PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK

Harun Ni'am¹, Ismiyatun², Puspita Sari³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

Email: harunniam1@gmail.com

Abstract

Indonesia has held the 2024 presidential election. One of the issues that was previously widely discussed was identity politics. This is based on the experience of strengthening identity politics in several previous electoral competitions, such as the 2014 presidential election, the 2017 Jakarta regional head election, and the 2019 presidential election. However, it turns out that the phenomenon of identity politics in the 2024 presidential election is relatively weak. This is influenced by many factors. Political communication plays an important role in this problem. This study uses a qualitative method and uses the theory of Jay G. Blumler and M. Gurevitch which offers four components in political communication, namely political institutions, audience orientation, media institutions, and the relevance of political culture.

Keywords: *Identity Politics, Political Communication, Presidential Election*

Abstrak

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan presiden tahun 2024. Salah satu isu yang sebelumnya banyak diperbincangkan adalah politik identitas. Hal ini berdasarkan pengalaman menguatnya politik identitas dalam beberapa kompetisi elektoral sebelumnya, seperti pemilihan presiden tahun 2014, pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2017, dan pemilihan presiden tahun 2019. Namun, ternyata fenomena politik identitas dalam pemilihan presiden tahun 2024 relatif melemah. Hal ini dipengaruhi banyak faktor. Komunikasi politik memegang peranan penting dalam permasalahan ini. Penelitian ini memakai metode kualitatif serta menggunakan teori Jay G. Blumler dan M. Gurevitch yang menawarkan empat komponen dalam komunikasi politik, yaitu lembaga politik, orientasi khalayak, lembaga media, dan relevansi budaya politik.

Kata Kunci: *Politik Identitas, Komunikasi Politik, Pemilihan Presiden*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2024 Indonesia menyelenggarakan agenda demokrasi berupa Pemilihan Umum, yakni Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Adapun kontestan dalam Pemilihan Presiden 2024 ada tiga pasangan calon yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pada 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.²

Pemilihan Umum 2024 menjadi pemilihan umum keenam dalam masa reformasi dan pemilihan umum ketiga belas dalam sejarah pemilihan umum Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Karena itu, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 seharusnya dapat menunjukkan kematangan Indonesia dalam melaksanakan demokrasi. Warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan Pemilu 2024 ini dapat dilaksanakan secara aman, jujur, adil dan demokratis.

Pemilihan Umum 2024 diharapkan akan melahirkan sejumlah perubahan penting dan strategis dalam kepolitikan Indonesia. Pemilu 2024 juga mempunyai arti strategis karena pemerintahan baru yang terpilih akan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045 atau untuk 20 tahun ke depan.³ Pemilu ini juga menjadi titik persimpangan yang akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan.

Pemilihan Umum 2024 merupakan salah satu pemilihan umum terbesar dan terkompleks di dunia. Tentu bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan pemilihan umum ini, baik dari sisi pelaksanaan teknis prosedural, maupun dalam sisi substansi nilai-nilai dasar demokrasi seperti jujur, adil dan berintegritas. Selain itu, tantangan Pemilihan Umum 2004 juga sangat banyak. Sebagai contoh adalah rendahnya pendidikan politik, praktik politik uang, jual beli suara dan politik identitas. Permasalahan politik identitas menjadi tantangan tersendiri berdasarkan pengalaman menguatnya politik identitas dalam beberapa kompetisi elektoral sebelumnya,

Dalam rangkaian Pemilihan Umum 2014 ini, pemilihan presiden dan wakil presiden tentu mendapatkan perhatian yang terbesar. Wajar jika isu politik identitas dinilai akan tetap mewarnai di dalamnya. Apalagi kalau melihat politik Indonesia yang memang selama lebih dari

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

² Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 40.971.906 suara (24, 95 persen), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 96.214.691 suara (58,58 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 27.040.878 suara (16,47 persen). Lihat <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12300/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-tahun-2024>, tanggal 20 Maret 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

³ “Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif”, www.csis.or.id. Diakses tanggal 10 Desember 2024.

satu dekade ini sering ditandai dengan menguatnya politik identitas. Sejak Pemilihan Presiden 2014 politik identitas seperti menjadi isu utama. Isu-isu yang berkaitan dengan agama, etnik, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elite politisi untuk memberi stigma negatif lawan-lawan politiknya.⁴ Politik identitas kemudian menguat pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, terutama imbas kasus penodaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kasus ini memancing unjuk rasa yang sangat besar dan membelah masyarakat dalam polarisasi politik. Maraknya diskursus yang mengaitkan isu identitas dan politik elektoral saat itu merupakan indikasi semakin menguatnya politik identitas menuju Pemilihan Presiden 2019.⁵ Indikasi itu kemudian terbukti karena politik identitas memang berlanjut saat Pemilihan Presiden 2019, bahkan mengalami eskalasi yang signifikan.⁶

Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024, isu politik identitas sebenarnya juga muncul namun tidak menguat seperti halnya dalam Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Presiden 2019. Fenomena menarik terjadi untuk Pemilihan Presiden 2024 yang secara umum menunjukkan bahwa politik identitas mengalami kecenderungan melemah atau menurun. Politik identitas tidak lagi menjadi wacana dominan dalam perbincangan-perbincangan atau persaingan-persaingan selama proses pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif tahun 2024 ini. Ada banyak faktor dalam memahami fenomena ini. Penurunan pemakaian politik identitas ini tentu harus mendapatkan apresiasi dan menjadi modal berharga untuk agenda elektoral ke depan.

Ada dua hal pokok yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Pertama, identifikasi praktik politik identitas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024. Hipotesa sementara, terjadi penurunan praktik politik identitas pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2014 dan 2019. Ini merupakan hal yang mengejutkan karena lebih dari satu dekade ini politik Indonesia sering disesaki dengan praktek politik identitas. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan politik identitas dalam Pemilihan Presiden 2024 yang dalam hal ini didasarkan pada teori komunikasi politik.

⁴ Marcus Mietzner, “Indonesia’s 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived”, *Journal of Democracy*, Volume 25 Nomor 04, Tahun 2014, hal. 111–125.

⁵ A. G. Herdiansah, Junaidi dan Ismiati, H, “Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?”, *Jurnal Wacana Politik*, Volume 2, Nomor 01, Tahun 2017, hal. 122-134.

⁶ Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies Publications, 2019), hal. 124.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis identifikasi politik identitas dalam Pemilihan Presiden 2024. Sumber data berasal dari buku-buku, artikel-artikel dan dokumen laporan resmi terkait politik identitas dalam Pemilihan Presiden 2024.

Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri data-data awal perkembangan politik identitas dalam politik pemilihan umum dengan penekanan Pemilihan Presiden 2024. Observasi terhadap berita yang berkaitan dengan pengambilan data politik identitas dalam Pemilihan Presiden 2024 dilakukan untuk menggali komunikasi politik dalam melihat politik identitas terkait proses, pola, aktor, materi dan media. Dalam upaya memperkuat dan mengkonfirmasi data, maka perlu dilaksanakan wawancara dengan berbagai narasumber kunci.⁷ Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan.

Pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menggunakan kerangka pendekatan komunikasi politik. Secara umum, komunikasi politik dapat dipahami sebagai penyampaian pesan-pesan terkait politik dari komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang diinginkan oleh penyampai pesan atau pemilik pesan. Komunikasi politik dapat berfungsi untuk mengatur perbuatan manusia dalam kondisi normal maupun ketika terjadi persoalan serius bahkan konflik dengan semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Karena itulah, komunikasi politik memegang peranan penting dan tempat strategis yang sangat menentukan dalam proses pelaksanaan demokrasi dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk dalam hal permasalahan politik identitas.

Ada peran penting dalam komunikasi politik yang dimainkan oleh komunikator politik seperti aktivis, konsultan, politisi, praktisi marketing, profesional dan juru bicara. Selain itu, ada juga proses persuasi, pesan politik, media politik, khalayak ramai (*audience*) serta akibat yang ditimbulkan dalam proses komunikasi politik tersebut.⁸ Dalam komunikasi politik ada pertarungan kepentingan politik untuk mempengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik yaitu pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). Dalam suatu masyarakat terdapat komunikasi

⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California: SAGE, 2016), hal. 5. dan S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2018) hal. 25-27.

⁸ Jay G. Blumler and Michael Gurevitch, *The Crisis of Public Communication*, (London and New York: Routledge, 1995), hal. 12.

politik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinamika politik di mana proses komunikasi itu bekerja.⁹

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch yang menawarkan empat komponen dalam komunikasi politik. Pertama, institusi politik dengan aspek-aspek komunikasi politiknya. Kedua, orientasi khalayak terhadap komunikasi politik. Ketiga, institusi media dengan aspek-aspek komunikasi politiknya. Keempat, aspek-aspek komunikasi yang relevan dengan budaya politik. Semua komponen itu saling berkaitan dan harus dilihat dari konteks yang mengitarinya¹⁰.

C. TEMUAN DAN DISKUSI

Banyak studi terdahulu memaparkan bahwa ada berbagai permasalahan serius dalam demokrasi Indonesia, termasuk dalam hal sirkulasi kekuasaan. Namun demikian, pemilihan umum masih tetap dianggap sebagai perangkat demokrasi yang dipercaya oleh publik sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk melakukan sirkulasi kekuasaan untuk memperoleh legitimasi politik yang baru. Berdasarkan hal ini maka penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan berintegritas menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan pemilihan umum yang dapat bermanfaat dan bermakna bagi pembangunan demokrasi. Tidak mudah mewujudkan pemilihan umum seperti ini dan banyak tantangannya. Salah satu tantangan besar adalah politik identitas.

1. Politik Identitas

Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap kelompok identitas politik untuk turut berpartisipasi dan mencapai kepentingannya secara bebas dengan menampilkan identitas latar belakangnya sehingga penggunaan identitas tidak bisa dilarang. Yang dimaksud identitas di sini sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi, yaitu kategori sosial di mana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki 'identitas' yang sama. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan.¹¹ Identitas di sini bisa berupa suku, agama, ras, antargolongan dan budaya. Dalam identitas seseorang atau kelompok terdapat jati diri dan kehormatan.

⁹ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia : Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 9.

¹⁰ Jay G. Blumler and Michael Gurevitch, *Op. Cit.*, hal. 16.

¹¹ P. J. Burke, "Introduction". dalam P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & P. A. Thoits (Eds.), *Advances in Identity Theory and Research*, (New York: Plenum Publishers, 2016), hal. 68-78.

Penggunaan beragam identitas dalam batas tertentu yang proporsional bahkan menjadi penguat dan penghias demokrasi.

a. Politik Pengakuan

Meminjam istilah Charles Taylor dalam teori *Politics of Recognition*, identitas merupakan pemahaman terhadap diri dengan karakteristik fundamental yang mendefinisikan kemanusiaan seseorang. Ada penekanan tentang pentingnya politik pengakuan dan penghormatan terhadap kekhasan identitas yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok. Ketiadaan pengakuan identitas akan menghalangi seseorang untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia.¹²

Dalam konteks politik pengakuan, tidak ada yang salah dari politik identitas. Penggunaan politik identitas bahkan dapat memunculkan semangat integrasi nasional, kebebasan, toleransi dan saling menghormati. Dalam perspektif lain, politik identitas juga dapat merupakan respon alami yang tidak terhindarkan dari perasaan terancam dan ketidak-adilan yang dialami.

Sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari penggunaan politik identitas ini, termasuk dengan menggunakan identitas agama dan suku. Politik identitas bahkan menjadi modal semangat integrasi nasional dalam berbagai peristiwa krusial seperti kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan dan berbagai dinamika politik setelah kemerdekaan. Politik identitas juga terlihat dalam berbagai perdebatan kebangsaan seperti dalam lembaga BPUPKI, PPKI dan Konstituante.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, politik identitas yang berdasar nilai Islam merupakan suatu kewajaran. Paling tidak bisa dilihat dari berbagai contoh dalam perjalanan sejarah partai politik, politik elektoral (pemilu) dan praktik pemerintahan dari dulu sampai sekarang. Keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan agama (Islam) adalah sesuatu yang legal dan diakui oleh negara. Pencitraan politik dengan simbol-simbol identitas keagamaan seperti pakaian, ucapan dan tindakan dalam masa kampanye menjadi hal yang biasa dan lumrah. Perdebatan perumusan kebijakan di lembaga-lembaga negara sering kali juga diramaikan dengan politik identitas berdasar agama.

Berbagai contoh tersebut merupakan politik identitas yang tidak menimbulkan masalah. Walaupun ada kontroversi di dalamnya maka masih dianggap wajar dalam koridor demokrasi.

¹² Charles Taylor, *Multiculturalism and "Politics of Recognition"*, (New Jersey: Princeton University Press, 1992), hal. 32.

Dalam hal ini, pengaruh dinamika politik yang terjadi hanya sebatas pada fluktuasi indeks demokrasi, tidak terlalu mengganggu kohesivitas masyarakat secara signifikan.

b. Politik Kebencian

Politik identitas yang sedang ramai diperbincangkan sekarang secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah strategi politik yang menekankan pada perbedaan identitas dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas menjadi permasalahan ketika identitas ditafsirkan atau ditegaskan dengan cara tertentu yang melampaui batas. Dalam hal ini, politik identitas akan menghalalkan segala cara dan menyebabkan munculnya pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik, pertentangan dalam kohesivitas masyarakat dan polarisasi. Apalagi jika persoalan identitas ini berkembang menjadi konflik laten di tengah masyarakat yang bisa meledak kapan saja.

Francis Fukuyama menyatakan bahwa identitas mempunyai dua potensi yang bisa saling berbenturan. Di satu sisi, identitas berpotensi sebagai upaya untuk membangun integritas diri. Namun di sisi lain, identitas bisa dieksploitasi sehingga berpotensi menjadi sarana memecah belah kehidupan sosial politik. Secara alamiah, identitas dalam diri manusia tidak memiliki orientasi politis dan kepentingan sama sekali, Identitas hanya menuntut penghormatan martabat (*demand for dignity*). Namun ketika identitas dipaksa harus berselingkuh dengan kontestasi politik, perebutan kekuasaan, dan ideologi tertentu, maka penggunaan identitas akan melahirkan praktik politik kebencian (*politics of resentment*) terhadap kelompok lain.¹³

Politik identitas yang berdasar kebencian itu secara umum mengandalkan praktik eksploitasi politisasi identitas. Politisasi merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok institusi atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan atau mempertahankan kekuasaan (Adediji 2016).¹⁴ Di titik inilah politik identitas menjadi permasalahan serius. Politik identitas dalam artikel ini diartikan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi atau memanipulasi identitas, baik itu berbasis agama, etnik, atau ideologi tertentu untuk menimbulkan opini atau stigma dari masyarakat dengan tujuan kepentingan politik.

¹³ Francis Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018), hal. 9.

¹⁴ Ademola Adediji, *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation*, (Berlin: Springer VS, 2016), hal. 56-80.

Mendukung orang atau kelompok atas dasar kesamaan identitas adalah sah. Namun membenci orang atau kelompok yang mempunyai identitas berbeda akan memunculkan sentimen negatif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Polarisasi politik akan terjadi dan membelah masyarakat dalam ketegangan sosial. Di titik inilah politik identitas menjadi permasalahan serius yang harus dilawan.

c. Tawaran Solusi

Ada beberapa tawaran solusi untuk menyikapi politik identitas. Pertama, menurut Fukuyama, bukan dengan cara meninggalkan gagasan identitas, namun mendefinisikan sebuah identitas nasional yang lebih besar dan lebih integratif dengan memperhitungkan keragaman yang ada.¹⁵ Dalam hal ini, pendidikan politik kebangsaan dan kewarganegaraan dengan pendekatan integratif menjadi penting.

Kedua, semua pihak harus menghentikan praktik politik berbahaya yang menjadikan narasi kebencian berbasis politik identitas sebagai amunisi untuk meraup dukungan elektoral. Tidak perlu lagi menunjukkan sikap penyangkalan (*denial*) dan berdalih bahwa yang terjadi adalah politik identitas sebagai politik pengakuan, bukan politik kebencian. Terlalu mahal taruhannya untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam jangka panjang.

Ketiga, pemerintah juga harus mengurangi kebijakan kontroversial yang justru semakin menambah polarisasi politik di tengah masyarakat. Kesamaan perlakuan hukum juga harus dilaksanakan supaya semua kalangan masyarakat merasa diperlakukan secara adil.

Ada harapan bahwa basis pertimbangan politik elektoral dalam demokrasi adalah rasionalitas yang mengukur kapasitas calon untuk dipilih berdasarkan kemampuan, bukan atas dasar kesamaan identitas agama atau etnik semata. Perhelatan pemilihan presiden atau kontestasi elektoral lainnya diharapkan dapat berjalan demokratis dan rasional, serta tidak melanjutkan kegaduhan politik identitas berlatar belakang politisasi suku, agama, ras, antargolongan dan budaya atau yang lain.

2. Pengalaman Pemilihan Presiden

Proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari orientasi identitas baik suku, agama, ras dan antargolongan. Hal ini dapat dilihat pada kontestasi partai-partai politik yang mengikuti

¹⁵ Francis Fukuyama, *Op. Cit.*, hal. 36.

pemilihan umum. Berbagai ragam identitas itu sering kali dijadikan sebagai alat politik.¹⁶ Ironisnya, beberapa kontestasi politik, baik di tingkat daerah maupun nasional, menunjukkan bahwa politik identitas yang melampaui batas telah memunculkan dampak mengkhawatirkan. Sebagai contoh adalah Pemilihan Presiden 2014, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019. Ketiga ajang politik itu mengeksploitasi isu identitas, terutama agama, yang melampaui batas. Hanya untuk mengumpulkan suara, banyak narasi kebencian dimunculkan terhadap kelompok yang mempunyai identitas berbeda. Polarisasi dalam masyarakat pun tidak terhindarkan. Tidak sedikit pelaku yang menganggap politik identitas sebagai perintah agama. Saat itu politik identitas ditopang juga oleh populisme politik, persoalan pasca-kebenaran (*post-truth*) dan matinya kepakaran (*the death of expertise*). Berbagai fitnah dan hoax berbasis identitas tidak jarang digunakan sebagai senjata untuk menghantam lawan politik.

Masalahnya adalah partai politik dan kontestan pemilu tidak cukup kuat menghadang politik kebencian berdasar politik identitas. Banyak politisi mendiamkannya bahkan tidak segan bekerja sama dengan kelompok yang melakukan politik kebencian. Mereka berpikir jangka pendek tanpa menghitung efek jangka panjang ketika menggunakan sentimen negatif politik kebencian sebagai bahan bakar mendulang dukungan suara. Partai politik dan elit politik yang seharusnya ikut melawan politik kebencian, justru malah memanfaatkannya. Dalam rangka kemenangan pemilihan umum, mereka memainkan isu politik identitas melalui kampanye untuk melakukan mobilisasi dukungan massa. Sehingga alih-alih dukungan yang diperoleh berdasarkan visi-misi para calon, dukungan masyarakat terhadap kandidat justru ditentukan oleh sentimen terhadap berbagai perbedaan identitas suku, agama, ras dan antargolongan.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut Pemilihan Umum 2014 dan 2019 menjadi pengalaman buruk tentang penggunaan politik identitas dalam kontestasi politik elektoral. Dua pemilihan umum tersebut dianggap pengalaman yang sangat buruk terkait politik identitas, di mana orang menggunakan agama sebagai senjata untuk mendapatkan dukungan politik dengan menyerang orang lain.¹⁷

Selama sekitar satu dekade itu sering terjadi pertentangan antara identitas nasional yang dihadapkan dengan identitas suku, agama, ras dan antargolongan sehingga berpotensi

¹⁶ Dinar Astuti dkk, “Politik Identitas dalam Kontroversi Isu di Indonesia”, *Sibatik Journal*, Volume 2 Nomor 06 Tahun 2023, hal. 1770.

¹⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230804204916-617-982197/gus-yahya-pemilu-2014-2019-pengalaman-buruk-politik-identitas>. Tanggal 4 Agustus 2023,. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

mengganggu demokrasi dan keharmonisan bernegara. Pertentangan pandangan tentang identitas politik tersebut melahirkan berbagai isu yang meluas di tengah-tengah masyarakat. Yang menggembirakan, di lain pihak, semakin menguatnya isu politik identitas akhirnya juga kemudian mendapatkan perlawanan sebaliknya dari kelompok yang mengatasnamakan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang menghormati perbedaan identitas.

Sama seperti pemilihan umum lainnya, menjelang Pemilihan Presiden 2024, suhu politik sudah mulai menghangat. Berbagai isu terkait pemilu ramai diperbincangkan seperti partai politik peserta, koalisi partai politik, kandidat calon presiden dan wakil presiden, visi misi, program kerja, politisasi agama. rendahnya pendidikan politik, praktik politik uang, jual beli suara dan politik identitas.

Isu politik identitas dalam pemilihan presiden tahun 2024 tetap masih ramai diperbincangkan. Pengalaman dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 masih menjadi kekhawatiran yang akan berlanjut. Akibat pengalaman dalam kedua pemilihan presiden itu, politik identitas bukan bersifat temporer, tapi sudah berakar pada pembelahan sosial yang memunculkan polarisasi masyarakat yang serius.

Peta kekuatan politik setelah Pemilihan Presiden 2019 boleh jadi berubah seiring masuknya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun hal itu tidak secara otomatis menghilangkan pengaruh polarisasi setelah Pemilihan Presiden 2019. Dengan kata lain, politik identitas dan polarisasi diperkirakan akan berlanjut di Pemilihan Presiden 2024.

Namun dalam perkembangannya, semakin mendekati puncak proses pemilihan umum yaitu pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 justru kekhawatiran tentang politik identitas tidak terbukti. Secara umum fenomena politik identitas melemah. Memang ada beberapa kasus yang dihubungkan dengan politik identitas namun tidak terlalu membahayakan. Sebagai contoh tayangan video Azan Maghrib di salah satu stasiun televisi Indonesia yang memperlihatkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyalami jamaah yang datang hingga melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kasus ini lebih tepat disebut pencitraan politik dengan simbol-simbol identitas keagamaan daripada disebut politik identitas. Contoh lain adalah saat Partai Umat yang secara terbuka mengusung politik identitas namun akhirnya tidak mendapat respon yang bagus dari publik. Banyak kalangan masyarakat sipil yang memberi kritik terhadap

langkah Partai Umat ini, bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melayangkan protes.¹⁸

3. Komunikasi Politik

Sebagaimana sudah disebutkan dalam bagian metodologi, penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch yang menawarkan empat komponen dalam komunikasi politik, yaitu institusi politik, orientasi khalayak, institusi media dan aspek budaya politik. Dalam melihat politik identitas dalam Pemilihan Presiden 2024, keempat komponen itu saling berkaitan dan harus dilihat dari konteks yang mengitarinya.

a. Institusi politik

Institusi politik mempunyai peran penting dalam menahan laju politik identitas. Institusi politik yang dimaksud dapat berupa pemerintah sebagai representasi negara, partai politik, organisasi masyarakat dan tokoh perorangan. Peran institusi politik ini penting karena dinilai sebagai representasi aspirasi publik. Pemerintah dapat menerbitkan berbagai regulasi dan melaksanakan pendidikan politik yang komprehensif. Demikian juga partai politik, organisasi masyarakat dan tokoh perorangan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan posisi dan kewenangan yang dimilikinya.

Tentang permasalahan politik identitas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2022 berpesan supaya tidak ada lagi praktik politik identitas maupun politisasi agama pada Pemilihan Umum 2024. Jokowi menyatakan, demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa dengan memperkuat konsolidasi nasional supaya tidak ada lagi polarisasi di tengah masyarakat. Pesan Jokowi ini kemudian diteruskan oleh berbagai kementerian.

Menkopolkam RI Mahfud MD berpendapat bahwa sebetulnya politik identitas tidak menjadi masalah selama konteksnya tidak menyerang habis orang lain. Setiap orang memiliki identitas politik. Hal itu boleh digunakan, namun tidak boleh dijadikan untuk merugikan atau bahkan membasmi orang lain dalam konteks SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Mahfud menyatakan sebuah identitas boleh digunakan untuk semangat kebersamaan serta membangun Indonesia. Bahkan, Mahfud tidak melarang adanya ceramah politik di masjid, asalkan sifatnya inspiratif, namun melarang apabila ada ceramah politik di masjid yang

¹⁸ <https://news.detik.com/pemilu/d-6579919/partai-umat-kami-politik-identitas-bikin-bawaslu-beri-protas-keras>, tanggal 21 Februari 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

bertujuan untuk mengarahkan ke politik praktis tertentu, misalnya dengan menyerukan kepada jemaah agar tidak memilih calon tertentu.¹⁹

Kementerian Agama membuat regulasi untuk tidak menggunakan politik identitas dan menerbitkan surat edaran terkait khotib Jumat yang diimbau untuk menyebarkan pesan-pesan kedamaian menjelang pemilihan umum. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan antisipasi sejak enam bulan sebelum pemilihan umum. Kementerian ini menggandeng berbagai *stakeholders*, termasuk media arus utama di berbagai *platform*, juga dengan *platform* media sosial yang dinilai menjadi tempat paling rentan untuk penyebaran disinformasi dan misinformasi sebagai sumber politik identitas.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat menolak politik identitas dalam Pemilihan Umum 2024. Para pimpinan dua ormas Islam terbesar ini menilai politik identitas sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan politik identitas merupakan praktik politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner. Tidak ada tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan lainnya. Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan karena politik identitas menyandarkan primordial SARA, maka sering terjadi politisasi sentimen-sentimen SARA yang kemudian membawa pada polarisasi. Bahkan di tubuh setiap komunitas dan golongan, itu bisa terjadi. Karena itu kontestasi harus mengedepankan politik yang objektif, rasional, dan dalam koridor demokrasi yang modern.²⁰

b. Orientasi khalayak

Komponen orientasi khalayak (*audience*) dapat berupa gambaran tentang publik yang terkait dengan permasalahan dan biasanya memaparkan berbagai alasan yang disampaikan dalam komunikasi politik. Untuk permasalahan politik identitas dalam Pemilihan Presiden 2024 sangat penting untuk melihat profil pemilih terbesar yaitu generasi muda. Demikian juga

¹⁹<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6592989/mahfud-md-sebut-boleh-ceramah-politik-di-masjid-asal>, tanggal 28 Februari 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

²⁰ <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-muhammadiyah-sepakat-tolak-politik-identitas-20D2p>, tanggal 25 Mei 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

dengan sikap mereka menyikapi permasalahan politik identitas di antara isu-isu lain terutama yang sangat terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Ada hal menarik tentang tingkat populasi menjelang Pemilihan Umum 2024, yaitu terjadi perubahan demografi yang ditandai dengan membesarnya jumlah pemilih muda (generasi z dan milenial) yang berusia 17-40an tahun. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU tanggal 2 Juli 2023, total jumlah pemilih adalah 204.807.222 (74 persen dari total populasi warga negara Indonesia).²¹ Pemilih muda (generasi z dan milenial) mendominasi pemilih secara nasional, dengan jumlah 115.622.550 (56,45 persen). Jumlah ini berarti lebih dari setengah total pemilih. Dengan perincian pemilih generasi z berjumlah 46.800.161 (22,85 persen) dan generasi milenial berjumlah 68.822.389 (33,60 persen). Sementara total pemilih dari generasi di atasnya, yaitu generasi x, generasi *baby boomer* dan generasi *pre-boomer* adalah 89.184.672 (43,54 persen). Artinya nasib Indonesia, setidaknya dalam lima tahun ke depan, sangat ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilihan umum.

Besarnya jumlah pemilih muda memunculkan dilema tersendiri. Di satu sisi, hal ini dapat dipandang secara positif dikatkan dengan semangat pemilih muda yang masih segar dan progresif sebagai berkah dari bonus demografi. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang berbagai tantangan pemilihan umum termasuk politik identitas yang memunculkan kebencian. Narasi kebencian terhadap kelompok lain memiliki “pangsa pasar” di kalangan masyarakat tertentu. Tidak hanya di kalangan pemilih tua, narasi kebencian juga tersebar di pemilih muda. Ini merupakan alarm berbahaya karena menunjukkan bahwa politik identitas dengan narasi kebencian yang ditopang polarisasi politik yang tinggi telah berdampak negatif terhadap generasi muda sebagaimana terjadi pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.

Dalam Pemilihan Presiden 2024, kekhawatiran terhadap pemilih muda yang rentan terhadap politik identitas ternyata tidak terbukti. Ada perubahan perspektif politik Pemilihan Presiden 2024 yang ditopang oleh tipikal pemilih muda yang adaptif, dinamis dan responsif, terutama pergeseran minat mereka tentang karakteristik kepemimpinan nasional dan isu-isu politik mutakhir. Ada peningkatan ketertarikan pemilih muda terhadap karakter calon pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. Isu-isu strategis yang menarik minat pemilih muda adalah kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, demokrasi dan

²¹<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-dalam-negeri-dan-luar-negeri-2048-juta-pemilih>, tanggal 2 Juli 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

kebebasan sipil, kesehatan serta lingkungan hidup²². Isu yang berhubungan dengan politik identitas tidak menarik bagi pemilih muda ini.

c. Institusi Media

Dengan semakin bagusnya sistem internet dan infrastruktur digital di Indonesia, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah. Ini membuat publik cenderung memiliki literasi yang lebih baik terhadap informasi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan publik mengakses sumber-sumber informasi alternatif sebagai penyeimbang informasi yang disajikan oleh media-media konvensional. Hal ini pada gilirannya akan mendatangkan pandangan-pandangan yang beragam dalam banyak hal karena informasi tidak lagi dikuasai oleh segelintir pihak saja. Namun dengan kondisi ini tetap ada celah yang dapat membuat atmosfer teknologi informasi menimbulkan permasalahan yang di antaranya adalah politik identitas.

Dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, polarisasi masyarakat oleh politik identitas tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, khususnya media sosial. Keberadaan media sosial bahkan mempercepat polarisasi dan kebencian karena mudah menghubungkan orang-orang yang berfikiran sama tanpa perlu memperhitungkan lokasi geografis. Kondisi semakin memburuk karena ditambah keberadaan *buzzer*, relawan dan simpatisan dari berbagai pihak yang sering memancing provokasi di media sosial.

Dalam rentang waktu sekitar tahun 2010-2020 kepemilikan akun media sosial meningkat secara signifikan, terutama dari kalangan generasi muda.²³ Dalam rentang waktu itu juga terjadi banyak pergeseran perilaku publik dalam dunia digital, terutama tentang media sosial. Salah satu pergeseran yang menarik adalah sumber referensi informasi. Mereka mulai menjadikan media sosial sebagai sumber referensi informasi utama, bukan lagi media massa arus utama (*mainstream*) yang konvensional. Media sosial semakin diandalkan dalam menerima dan membentuk informasi di benak publik.²⁴ Kalau dihubungkan dengan lini masa pemilihan

²² Arya Fernandez dkk, *Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif*, (Jakarta: Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, 2023), hal.

²³ Whatsapp mengalami peningkatan dari tahun 2017 (70,3 persen), 2018 (91,6 persen), dan 2022 (98,3 persen). TikTok sekarang dimiliki sekitar 56 persen anak muda. YouTube dan Instagram juga meningkat tajam dalam periode yang sama. Sedangkan Facebook tetap banyak pengguna meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 (84,8 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2018 (93,1 persen). Sementara pengguna Twitter relatif terbatas, yaitu sekitar 20an persen. Lihat *Ibid*.

²⁴ Pada tahun 2018, baru ada 39,5 persen anak muda yang mengakses informasi lewat media sosial, sementara mereka yang mengakses informasi lewat televisi angkanya lebih tinggi yakni 41,3 persen. Pada tahun 2022, kondisinya berubah di mana pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi meningkat menjadi 59 persen, sedangkan akses terhadap televisi turun menjadi 32 persen saja. Sumber-sumber referensi informasi lain seperti

presiden di Indonesia, maka dalam rentang waktu itu ada kontestasi Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Presiden 2019.

Secara umum ketika banyak kalangan dari publik, terutama genarasi muda, memanfaatkan internet dan media sosial maka ini merupakan hal yang positif. Mereka akan memperoleh pandangan dari berbagai sudut pandang yang memperkaya cara pikir mereka. Dari sini diharapkan muncul kecenderungan kalangan generasi muda untuk lebih kritis dalam memahami isu-isu penting. Namun, harus juga diperhatikan bahwa hal ini juga akan mendatangkan konsekuensi tersendiri. Berbeda dengan model pemberitaan di media konvensional, bentuk informasi di media sosial yang cenderung cepat, singkat, dan sederhana serta minim verifikasi dan kontrol tentu berpotensi menghadirkan efek negatif jika tidak disikap secara bijak. Sebagai contoh adalah banyaknya kesalahpahaman, misinformasi, berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian dan politik identitas di media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, sangat penting bagi generasi muda untuk mempunyai kemampuan kedewasaan digital dalam menggunakan media sosial supaya dapat memanfaatkan potensi digital secara bagus dan produktif.

Pada Pemilihan Presiden 2024 muncul fenomena unik tentang pergeseran perilaku digital. Kalau menjelang pemilihan presiden sebelumnya publik menjadikan media sosial sebagai sumber referensi informasi utama, bukan lagi media massa *mainstream* yang konvensional, maka menjelang Pemilihan Presiden 2024 terjadi pergeseran kembali yang sebaliknya. Publik kembali mengandalkan media *mainstream* sebagai rujukan utama untuk mendapatkan kebenaran informasi. Pengalaman publik sebelumnya yang terlalu mengandalkan informasi dari media sosial tampaknya menemui titik jenuh dan menjadi pembelajaran yang penting.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap media *mainstream* kembali meningkat menjelang Pemilihan Umum 2024. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap media *mainstream* lebih tinggi dan ini merupakan kondisi yang kondusif. Sebagai contoh rata-rata kepercayaan publik terhadap media televisi mencapai 39 persen. Media *mainstream* dalam Pemilihan Umum 2024 juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi publik, memberikan edukasi kepada calon anggota legislatif, dan mengimbau masyarakat untuk tetap

berita online juga mengalami penurunan dari 8,2 persen pada tahun 2018 menjadi 6,3 persen pada tahun 2022. Sementara surat kabar, radio, dan *podcast* menjadi kanal informasi yang sangat kecil audiensnya. Lihat *Ibid*.

tenang,²⁵ termasuk menghadapi isu politik identitas. Sebelumnya, Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman pemberitaan isu keberagaman sebagai salah satu bentuk usaha pencegahan menguatnya politik identitas di media massa menjelang Pemilihan Umum 2024.²⁶

d. Budaya Politik

Pemilihan Presiden 2024 menunjukkan kedewasaan masyarakat berdemokrasi dalam permasalahan politik identitas, baik di kehidupan nyata sehari-hari maupun di dunia maya. Polarisasi masyarakat dengan isu politik identitas sangat berkurang secara signifikan bila dibandingkan dengan Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Di ruang digital berita bohong (*hoaks*) dan politik identitas sangat berkurang meski tidak sepenuhnya hilang. Masyarakat dinilai telah dapat menerima bahwa perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi. Karena itu, masyarakat mengambil sikap lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Pengalaman kedua pemilihan presiden sebelumnya menjadi pelajaran penting.

Budaya politik partisipan semakin menguat menghadapi politik identitas. Masyarakat mempunyai perhatian dan kesadaran tinggi akan hak dan kewajiban dalam kehidupan politik. Banyak dari kalangan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses menahan laju politik identitas, baik secara individu maupun bergabung dalam sebuah komunitas. Mereka memberikan dukungan atau tuntutan terhadap struktur, sistem dan budaya politik yang demokratis, bersih dari politik identitas dan penuh tawaran-tawaran segar yang rasional sesuai kebutuhan hidup yang dihadapi.

Budaya politik partisipan juga diperlihatkan masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap isu-isu yang dinilai lebih urgen dan konstruktif. Masyarakat lebih tertarik memperhatikan visi-misi dan program kerja yang ditawarkan pasangan calon, meskipun banyak diantaranya dinilai sebagai *gimmick* politik. Sangat sedikit yang membicarakan, apalagi mengeksploitasi, politik identitas dengan sentimen primordial terhadap para calon presiden dan wakil presiden.

²⁵ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7946/jelang-pemilu-isu-politik-identitas-berkurang-drastis?lang=1>, tanggal 6 Februari 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

²⁶ <https://www.antaranews.com/berita/3353883/dewan-pers-keluarkan-pedoman-pemberitaan-untuk-cegah-politik-identitas>, tanggal 18 Januari 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

4. Isu-Isu Selain Politik Identitas

Ada beberapa isu besar dalam Pemilihan Presiden 2024 selain persoalan visi misi pasangan calon, program kerja dan beberapa hal normatif lainnya. Isu-isu besar ini dalam perkembangannya mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, yaitu kontroversi Mahkamah Konstitusi (MK) dan politik dinasti, posisi Presiden Joko Widodo dan komposisi koalisi. Isu-isu itu sangat mendominasi pembahasan di pembicaraan Masyarakat sehari-hari maupun di media sosial. Isu-isu lain, termasuk politik identitas, tergeser oleh isu-isu itu.

a. Kontroversi Mahkamah Konstitusi dan Politik Dinasti

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan publik saat pemilihan presiden tahun 2024 adalah kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai terkait politik dinasti. Isu ini berawal dari permohonan *judicial review* terkait syarat batas usia masyarakat Indonesia untuk dapat menjadi kandidat dalam kontestasi pemilihan umum yang dalam hal ini adalah batas usia bagi seseorang untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden. Ada permohonan kepada MK untuk menguji Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap merugikan dan membatasi partisipasi politik masyarakat.

Pada 16 Oktober 2023, MK memutuskan untuk mengabulkan salah satu gugatan tentang batasan umur calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK menyatakan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945. MK memutuskan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan syarat sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan MK terhadap sebuah *judicial review* sebenarnya merupakan hal wajar dan itulah yang biasa terjadi selama ini. Namun putusan MK kali ini dinilai mempunyai perbedaan dan sarat kontroversi karena putusan tersebut sangat erat dikaitkan oleh publik dengan politik dan kepentingan Pemilihan Presiden 2024. Apalagi kalau melihat lini masa Pemilihan Presiden 2004, di mana masa pendaftaran presiden dan wakil presiden berlangsung tanggal 19-25 Oktober 2023. Putusan MK tersebut dinilai memberikan jalan kepada salah satu kandidat calon wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka (Gibran), untuk dapat maju berkontestasi mendampingi Prabowo Subianto. Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi),

sehingga kandidasi Gibran dinilai sebagai bentuk politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Penilaian tentang politik dinasti ini semakin kuat ketika yang mengumumkan putusan MK tersebut adalah Ketua MK Anwar Usman yang merupakan saudara ipar Presiden Jokowi dan juga paman Gibran.

Jika merunut rekam jejak keluarga Presiden Jokowi, kecenderungan politik dinasti dinilai sudah dimulai saat Gibran dan Muhammad Bobby Afif Nasution, menantu Jokowi sekaligus adik ipar Gibran, berlaga di pemilihan kepala daerah Kota Surakarta dan Kota Medan tahun 2020. Namun, isu politik dinasti saat itu belum menonjol karena keduanya berkontestasi di tingkat lokal (daerah) dan tidak ada persoalan dengan regulasi pemilihan kepala daerah. Mereka pun dipilih melalui kompetisi langsung meskipun di Surakarta lawan Gibran adalah pasangan calon dari jalur perseorangan yang dinilai banyak kalangan bukan lawan yang kuat bagi Gibran. Sementara, isu politik dinasti yang melibatkan MK ini menjadi isu besar karena ada di tingkat pusat dan terjadi perubahan regulasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Karena itu, wajar jika banyak kalangan menilai putusan MK tersebut sebagai bentuk kewenangan badan kehakiman yang sarat akan kepentingan politik dalam memutuskan masalah-masalah atau kontroversi dalam isu politik. Konsep kewenangan pengadilan untuk mengadili isu-isu atau kontroversi-kontroversi politik tersebut telah mengubah lembaga peradilan menjadi sebuah institusi politik atau sering dinamakan sebagai fenomena judisialisasi politik.²⁷ Putusan MK itu dinilai melampaui kewenangan dan akhirnya menuai kontroversi, bahkan reaksi negatif dari sejumlah kalangan, termasuk dari mereka yang sebelumnya menjadi pendukung Jokowi.

b. Posisi Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat selama dua periode kepresidenan (2014-2019) tidak dapat lagi berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini membuat tingkat kompetisi antar-calon presiden akan semakin ketat dan menarik. Rakyat Indonesia akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya menggantikan Presiden Joko Widodo. Ada tiga calon presiden yang akan berkontestasi yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang kemudian memutuskan untuk berpasangan dengan calon wakil presiden masing-masing, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

²⁷ Aditya Perdana dan Muhammad Imam, “Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024”, *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Bawaslu DKI Jakarta, Vol. 8 Nomor 3 Tahun 2023, hal. 72.

Secara umum, sampai beberapa bulan sebelum pemungutan suara, pola dukungan pemilih pada tiap-tiap calon presiden relatif rapuh. Hal ini juga sekaligus menunjukkan jika kekuatan sosok calon presiden belum menjadi jaminan keterpilihan, apalagi penentu kemenangan. Dalam upaya untuk memperkuat pilihan pemilih, maka penentuan calon wakil presiden menjadi penting. Selain itu diperlukan faktor-faktor lain yang signifikan dan dinilai sangat berpengaruh. Salah satu faktor itu adalah posisi keberadaan Presiden Joko Widodo.²⁸ Sejalan dengan semakin besarnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka semakin besar pula kepercayaan ataupun loyalitas publik pada sosok calon presiden yang direkomendasikan Presiden Joko Widodo.

Dapat dikatakan bahwa “faktor Jokowi” atau ”efek Jokowi” akan semakin berpengaruh dan mengambil tempat dalam peta persaingan calon presiden. Hal itu antara lain terlihat saat berbagai simulasi kontestasi tiga sosok calon presiden, tampak signifikan keberadaan faktor Jokowi dalam memoderasi pilihan publik. Simulasi persaingan antara Anies, Prabowo, dan Ganjar menunjukkan insentif elektoral potensial diraih oleh setiap sosok jika mendapatkan dukungan politik Jokowi. Dalam perkembangan terakhir, Presiden Jokowi dinilai berlabuh ke calon presiden Prabowo Subiyanto, apalagi calon wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka.

c. Komposisi Koalisi

Secara umum, dalam berbagai perhelatan pemilihan umum pasca-reformasi terjadi kecenderungan memudarnya persaingan politik berdasarkan aliran ideologi. Ideologi tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi. Hal ini menjadikan Semua partai dalam pemilu akhirnya cenderung ke “tengah” atau lebih moderat, dan bahkan pragmatis yang nantinya akan berebut suara dari ceruk yang sama dengan partai-partai yang lain. Kecenderungan ini juga terlihat dalam pembentukan koalisi dalam pemilihan presiden untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden. Komposisi partai politik dalam banyak koalisi memperlihatkan bahwa partai politik yang memiliki ideologi nasionalis bergabung dengan partai politik yang mempunyai basis massa Islam (religius).

Namun memudarnya aliran ideologi dan lebih moderat itu bukan berarti menghilangkan permasalahan laten tentang politik identitas, baik di level koalisi, partai politik maupun Masyarakat. Dari berbagai studi sebelumnya, salah satu penyebab politik identitas dan

²⁸ <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/09/signifikansi-jokowi-dalam-pilpres-2024>, tanggal 9 Oktober 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

polarisasi yang terjadi dalam Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Presiden 2019 adalah karena pasangan calon yang berkontestasi hanya ada dua pasangan (dua koalisi) Dalam Pemilihan Presiden 2014 ada pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara dalam Pemilihan Presiden 2019 ada pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kalau disederhanakan, dalam kedua pemilihan presiden itu Joko Widodo berkompetisi dengan Prabowo Subianto, yang dalam kedua kontestasi itu Joko Widodo keluar sebagai pemenangnya.

Dalam kedua pemilihan presiden itu publik terpolarisasi ke dalam kutub yang saling berhadapan. Tidak ada kutub lain sebagai alternatif atau pemecah polarisasi itu. Secara umum unsur pendukung koalisi kedua calon juga menjadi media untuk menyuburkan politik identitas dan polarisasi masyarakat. Visi Misi kedua calon seakan tenggelam oleh gelombang politik identitas, baik di ranah dunia maya (media sosial) maupun dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Peta kekuatan politik dan pendukung politik setelah Pemilihan Presiden 2019 berubah seiring masuknya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini merupakan peristiwa yang besar karena sebelumnya keduanya berhadapan secara sengit dalam dua edisi pemilihan presiden. Kebersamaan Prabowo Subianto dan Joko Widodo terus berlanjut sampai Pemilihan Presiden 2024. Secara umum, polarisasi masyarakat mulai mencair dan politik identitas melemah meskipun tidak hilang sama sekali. Apalagi dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 ini jumlah pasangan yang berkompetisi tidak lagi dua pasangan, namun tiga pasangan. Ketiga pasangan calon tersebut yaitu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berikutnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung oleh PDIP dan didukung PPP.

D. KESIMPULAN

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia merupakan salah satu pemilihan umum terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya ada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan pemilihan umum ini, baik dari sisi pelaksanaan teknis prosedural, maupun dalam sisi substansi nilai-nilai dasar demokrasi seperti jujur, adil dan

berintegritas. Selain itu, tantangan pemilihan umum tahun 2004 juga sangat banyak. Sebagai contoh adalah rendahnya pendidikan politik, praktik politik uang, jual beli suara dan politik identitas. Permasalahan politik identitas menjadi tantangan tersendiri berdasarkan pengalaman menguatnya politik identitas dalam beberapa kompetisi elektoral sebelumnya,

Menjelang Pemilihan Presiden 2024, isu politik identitas sebenarnya juga muncul namun tidak menguat seperti halnya dalam Pemilihan Presiden 2014 dan pemilihan Presiden 2019. Fenomena menarik terjadi untuk Pemilihan Presiden 2024 yang secara umum menunjukkan bahwa politik identitas mengalami kecenderungan melemah atau menurun. Politik identitas tidak lagi menjadi wacana dominan dalam perbincangan-perbincangan atau persaingan-persaingan selama proses pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif tahun 2024 ini. Dengan perspektif komunikasi politik dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan politik identitas itu adalah institusi politik, orientasi khalayak, institusi media dan budaya politik. Selain itu adanya berbagai isu-isu besar yang meminggirkan isu politik identitas, seperti isu kontroversi Mahkamah Konstitusi (MK), politik dinasti, posisi Presiden Joko Widodo dan komposisi koalisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adediji, Ademola, *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation*, (Berlin: Springer VS, 2016).
- Blumler, Jay G. and Michael Gurevitch, *The Crisis of Public Communication*, (London and New York: Routledge, 1995).
- Burke, P. J., "Introduction". dalam P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & P. A. Thoits (Eds.), *Advances in Identity Theory and Research*, (New York: Plenum Publishers, 2016).
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California: SAGE, 2016).
- Fernandez dkk, *Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif*, (Jakarta: Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, 2023).
- Fukuyama, Francis, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018).
- Mietzner, Marcus, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies Publications, 2019).
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2018).

Taylor, Charles, *Multiculturalism and "Politics of Recognition"*, (New Jersey: Princeton University Press, 1992).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Artikel Jurnal

Astuti, Dinar dkk, "Politik Identitas dalam Kontroversi Isu di Indonesia", *Sibatik Journal*, Volume 2 Nomor 06 Tahun 2023.

Herdiansah, A. G., Junaidi dan Ismiati, H, "Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?", *Jurnal Wacana Politik*, Volume 2, Nomor 01, Tahun 2017.

Mietzner, Marcus, "Indonesia's 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived", *Journal of Democracy*, Volume 25 Nomor 04, Tahun 2014.

Perdana, Aditya, dan Muhammad Imam, "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024", *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Bawaslu DKI Jakarta, Vol. 8 Nomor 3 Tahun 2023.

Media Massa

<https://www.antaranews.com/berita/3353883/dewan-pers-keluarkan-pedoman-pemberitaan-untuk-cegah-politik-identitas>, tanggal 18 Januari 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230804204916-617-982197/gus-yahya-pemilu-2014-2019-pengalaman-buruk-politik-identitas>, tanggal 4 Agustus 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://news.detik.com/pemilu/d-6579919/partai-ummat-kami-politik-identitas-bikin-bawaslu-beri-protas-keras>, tanggal 21 Februari 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6592989/mahfud-md-sebut-boleh-ceramah-politik-di-masjid-asal>, tanggal 28 Februari 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7946/jelang-pemilu-isu-politik-identitas-berkurang-drastis?lang=1>, tanggal 6 Februari 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/09/signifikansi-jokowi-dalam-pilpres-2024>, tanggal 9 Oktober 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-dalam-negeri-dan-luar-negeri-2048-juta-pemilih>, tanggal 2 Juli 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12300/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-tahun-2024>, tanggal 20 Maret 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-muhammadiyah-sepakat-tolak-politik-identitas-2024>, tanggal 25 Mei 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.